



Nasionalisme dalam Komunikasi Global (Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)

Penulis:
Azwar, M.Si

Instansi:
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran"
Jakarta.

Pendahuluan

- Makalah ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran terhadap peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.
- Persoalan dalam makalah ini dianalisis menggunakan Teori Globalisasi. Secara khusus penulis menggunakan konsep *disjuncture* yang dikemukakan Arjun Appadurai.
- Sementara itu metode penelitian penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Arjun Appadurai
(1990)

“Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy”

Homogenisasi pada dasarnya tidak hadir begitu saja, tetapi hadir dari persoalan yang terpisah-pisah yang menurut Appadurai disebut melalui *ethnoscapes*, *tekchnoscapes*, *financescapes*, *mediascapes*, dan *ideoscapes*.

Homogenisasi dalam kajian ini terlihat dari penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta, padahal peraturan perundang-undangan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan di ruang publik.

Temuan Penelitian

Arus globalisasi telah menyeret Indonesia secara umum, khususnya Jakarta sebagai lokasi penelitian penulisan makalah ini ke dalam dunia global yang homogen.

Arjun Appadurai
(1990)

“Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy”
Lima Lanskap Globalisasi

Pertama ethnoscaapes yang merupakan kelompok atau aktor yang selalu bergerak seperti turis, pengungsi dan pekerja asing yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia yang ditempati.

Arjun Appadurai
(1990)

Kedua, technoscapes adalah konfigurasi global dari teknologi dan fakta bahwa teknologi, baik teknologi tinggi maupun rendah, baik yang mekanistik maupun informasional, kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai jenis batasan yang dulu ada.

Arjun Appadurai
(1990)

Ketiga, financescapes ini melibatkan proses yang dengannya pasar, bursa saham nasional, dan spekulasi komoditas menggerakkan uang melalui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi.

Arjun Appadurai (1990)

Keempat, mediascapes adalah distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi (koran, majalah, televisi, studio film), yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak, dan... imaji dunia-dunia yang diciptakan oleh media ini.

Arjun Appadurai (1990)

Kelima, ideoscapes seperti *mediascapes*, *ideoscapes* adalah serangkaian imaji tetapi bersifat politis dan berhubungan langsung dengan ideologi negara dan kontraideologi dari gerakan-gerakan yang secara eksplisit berorientasi untuk merebut kekuasaan negara atau sebagian dari kekuasaan itu.

Arjun Appadurai
(1990)

Pada bagian ketiga belas (13) Rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia X tahun 2013 yang dilaksanakan di Jakarta, dinyatakan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Pelanggaran Bahasa di Ruang Publik

Hal tersebut di atas sudah diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Regulasi Tentang Bahasa

Pasal 38

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakpelayanan umum.
- (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Arjun Appadurai
(1990)

Artinya di ruang publik penggunaan bahasa Indonesia menjadi utama, digunakan untuk semua media yang ada di ruang publik. Pengecualian dari hal tersebut adalah bahasa daerah atau bahasa asing bisa digunakan jika hanya menyertai bahasa Indonesia. Namun yang terjadi adalah bahasa Indonesia justru ditinggalkan sama sekali, dan walaupun ada bahasa Indonesia, itupun bertentangan dengan Ayat (2) Pasal 38 UU No.24 Tahun 2009, yaitu bahasa Indonesia lah yang menyertai bahasa asing.

Kesimpulan

1. Pelanggaran Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik di Jakarta tidak terjadi begitu saja. Bahasa Indonesia menjadi inferior karena dianggap tidak memiliki nilai jual yang baik dan tidak memiliki citra yang baik untuk merek sebuah lembaga.
2. Fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan menipisnya rasa nasionalisme di era global.
3. Penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta merupakan salah satu indikasi menipisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia.

Saran

1. Untuk menjaga rasa nasionalisme di hati masyarakat Indonesia, maka perlu menegakkan aturan tentang kebahasaan, khususnya aturan kebahasaan di ruang publik.
2. Untuk menjaga agar rasa nasionalisme tidak terkikis di tengah-tengah bangsa Indonesia, penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta khususnya, di Indonesia pada umumnya harus berdasarkan aturan yang ada.



TERIMA KASIH